

## BAB II LANDASAN

### TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif *agency theory* merupakan teori dasar yang digunakan untuk memahami tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan manajemen laba. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*, yaitu *shareholders*) menunjuk orang lain (*agent*, yaitu manajer) untuk melakukan jasa untuk kepentingan *principal* termasuk pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agent*. Sebagai *agent*, manajer bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh *fee* sesuai kontrak.

Hubungan keagenan terjadi ketika perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*), serta hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu timbulnya *agency cost*. Pemilik sebagai penyedia modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada para manajer, Abdillah (2016).

Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Para manajer tersebut dalam menjalankan operasional tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek dibandingkan pemilik. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi dapat menjadi pemicu bagi para manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik terkait dengan kinerja ekonomi perusahaan. Jadi, teori ini timbul pada saat keinginan dan tujuan

dari *principal* dan *agent* berlawanan, dan melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent* adalah hal yang sulit bagi *principal*.

## 2.2 Manajemen Laba

### 2.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan, Sulistyanto (2008). Ada beberapa definisi mengenai manajemen laba, di antaranya :

1) Davidson, Stickney, dan Weil

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

2) Schipper

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bah hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

3) *National Association of Certified Fraud Examiners*

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

4) Fisher dan Rozenweig

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa, Rahadi (2014). Manajemen laba mengandung beberapa aspek menurut Healy dan Wahlen (1998) dalam Abdillah (2016), yaitu:

- a. Intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui penggunaan *judgment*, misalnya *judgment* yang digunakan untuk mengestimasi peristiwa-peristiwa ekonomi dimasa depan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.
- b. Tujuan manajemen laba adalah untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki informasi lebih yang tidak dapat diakses oleh pihak lainnya.

### **2.2.2 Pola Manajemen Laba**

Scott (2000) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:

#### **1. *Taking a Bath***

Pola ini terjadi pada saat pengangkatan *CEO* baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

#### **2. *Income Minimization***

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

#### **3. *Income Maximization***

Pola ini dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

#### 4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

### 2.2.3 Motivasi Manajemen Laba

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan di dalam *Positive Accounting Theory* (PAT) dan teori keagenan (*agency theory*). Tiga hipotesis dalam teori PAT yang dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman motivasi tindakan manajemen laba menurut Watts dan Zimmerman (1990) yaitu:

#### 1. *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer pada perusahaan dengan perencanaan bonus cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan saat ini.

#### 2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian hutang tersebut, maka semakin mungkin manajer menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode mendatang ke periode sekarang.

#### 3. *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan jika pada perusahaan yang besar memiliki biaya politik tinggi, maka manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari regulasi atau keputusan pemerintah, misalnya menaikkan pajak penghasilan perusahaan.

### 2.2.4 Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Pujiningsih (2011) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

#### 1. Memanfaatkan Peluang untuk Membuat Estimasi Akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

#### 2. Mengubah Metode Akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

#### 3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

### 2.3 Model Pengukuran Manajemen Laba

*Revenue Discretionary Model* diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Pertama, keterbatasan model akrual adalah bahwa estimasi *cross-sectional* secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan atau komponen beban, Stubben (2010).

Terdapat dua formula dalam *revenue discretionary model* yaitu pertama, adalah *revenue model*, model ini menitik beratkan pada pendapatan yang memiliki hubungan secara langsung dengan piutang. Kedua, yaitu *conditional revenue model*, model ini dikembangkan kembali dengan adanya penambahan ukuran

perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), dan margin kotor (*GRM*) yang diduga dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba akrual mengenai pemberian kredit yang berhubungan dengan piutang. Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan proksi dari kekuatan financial. Umur perusahaan merupakan proksi untuk tahap perusahaan dalam siklus bisnis. Sebagai proksi dari kinerja operasional dari perbandingan perusahaan dengan perusahaan competitor, digunakan *gross margin*.

Model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conditional revenue model* dari Stubben (2010) yang menggunakan piutang akrual daripada akrual agregat sebagai fungsi dari perubahan pendapatan. Sebagai komponen akrual utama, piutang memiliki hubungan empiris yang kuat dan hubungan konseptual langsung pada pendapatan. Dalam penelitiannya terdahulu, Stubben (2010) menemukan bukti bahwa hubungan antara perubahan piutang dan perubahan pendapatan yang lebih besar daripada hubungan antara *current accrual* dan perubahan piutang. *Conditional revenue model* didasarkan pada *revenue discretionary model* yang merupakan perbedaan antara perubahan aktual pada piutang dan perubahan prediksi pada piutang berdasarkan pada model. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah mengindikasikan adanya manajemen pendapatan.

*Revenue discretionary model* mengambil sejumlah bentuk. Beberapa melibatkan manipulasi aktivitas riil seperti diskon penjualan, kelonggaran persyaratan kredit, *channel stuffing*, dan *bill and hold sales* dan yang lainnya tidak, misalnya pengakuan pendapatan menggunakan agresif atau aplikasi yang salah dari GAAP, pendapatan fiktif dan penangguhan pendapatan. Pengakuan pendapatan lebih awal (*premature revenue recognition*) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. Dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang, Stubben (2010). Dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum terealisasi mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya, Nur'aini (2012).

Stubben (2010) menyatakan bahwa penggunaan model ini dapat mengukur manajemen laba dengan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan akrual. Formula atas *conditional revenue model* seperti yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 \Delta R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 \Delta R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 \Delta R_{it} \times AGE\_SQ_{it} + \beta_5 \Delta R_{it} \times GRR\_P_{it} + \beta_6 \Delta R_{it} \times GRR\_N_{it} + \beta_7 \Delta R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 \Delta R_{it} \times GRM\_SQ_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

AR = *Accounts Receivable* (piutang akrual)

R = *Revenue* (pendapatan)

SIZE = Natural log dari ukuran perusahaan (total asset) pada akhir tahun

AGE = Natural log dari Umur perusahaan (dalam tahun)

GRR\_P = *Industry median adjusted revenue growth* (= 0 if negative)

GRR\_N = *Industry median adjusted revenue growth* (= 0 if positive)

GRM = *Gross margin* (laba kotor) pada akhir tahun

\_SQ = *square of variable* (kuadrat dari variable)

$\Delta$  = *annual change* (perubahan tahunan)

$\epsilon$  = Error

Penjelasan mengenai formula *conditional revenue model* adalah sebagai berikut:

1.  $\Delta R$  atau perubahan pendapatan merupakan perubahan pendapatan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

$$\Delta R_t = \frac{R_t - R_{t-1}}{\bar{x} \text{ total aset}}$$

dimana: R adalah Pendapatan

2. *Size* merupakan ukuran perusahaan yang diperoleh melalui natural log dari total asset.

$$Size = \ln(\text{total aset})$$

3. *Age* adalah umur perusahaan yang diperoleh dengan cara menghitung berapa lamanya suatu perusahaan telah berdiri sampai dengan tahun dikeluarkannya laporan tahunan untuk masing- masing tahun, kemudian untuk *age square* diperoleh dengan mengkuadratkan hasil dari *age* tersebut.

$$Age = \log(\text{tahun penelitian} - \text{tahun pendirian})$$

4. *Growth Rate in Revenue* (GRR) merupakan persentase pendapatan (*revenue*) perusahaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. GRR terdiri atas GRR\_P,

yaitu jika GRR bernilai negatif maka sama dengan 0 dan GRR\_N, yaitu jika GRR bernilai positif maka sama dengan 0.

$$GRR_t = \frac{R_t - R_{t-1}}{R_{t-1}}$$

5. *Gross Margin* (GRM) diperoleh dengan membagi laba kotor (*gross profit*) dengan pendapatan (*revenue*), kemudian untuk GRM *square* dihitung dengan mengkuadratkan GRM tersebut.

$$GRM_t = \frac{R_t - COGS_t}{R_t}$$

dimana: COGS adalah Harga Pokok Penjualan

## 2.4 *Good Corporate Governance*

### 2.4.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *good corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan, *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

### 2.4.2 *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 biasanya dikenal dengan TARIF,



yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *good corporate governance* tersebut:

#### 1. Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### 3. Prinsip Responsibilitas (*responsibility*)

Memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggungjawab korporasi sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

#### 4. Prinsip Independensi (*independency*)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Prinsip Kesetaraan (*fairness*)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.4.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Dalam FCGI (2000) Mekanisme *Corporate Governance* meliputi :

#### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict* dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen, Pujiningsih (2011).

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, dimana pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal, Istianingsih (2016).

## 2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer maka manajer akan bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik manajer. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat, Shleifer dalam Lamora (2014).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola. Indikator yang digunakan adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh modal saham perusahaan, Suryani (2010). Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajer yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya.

## 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia keberadaan komisaris

independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan, Boediono (2005) dalam Suryani (2010).

#### 4. Ukuran Komite Audit

Komite audit sesuai dengan keputusan BAPEPAM Nomor Kep.29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite termasuk komite audit. Pembentukan komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi *good corporate governance* di perusahaan. Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Komite audit bertugas mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen, hal ini dilakukan supaya manajemen tidak bersifat oportunistik. Semakin banyaknya anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut, *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh

dewan komisaris, dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, Wicaksono (2014).

#### 5. Ukuran Dewan Komisaris

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain, melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan, Pujiningsih (2011).

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, Nasution (2007) dalam Rendi (2017). Hal tersebut harus dilakukan mengingat adanya kepentingan tertentu dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

#### 6. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan dan mekanisme pengendalian internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah

anggota dewan direksi pada suatu perusahaan, Muryati (2014). Keberadaan dewan direksi tersebut bertugas sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan, maka ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan, Rahadi (2014).

Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Wicaksono (2014), bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena dengan adanya beberapa anggota dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara anggota dewan direksi dengan dewan komisaris.

#### 7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Chen et al. (2006) dalam Prastiti (2013) menyatakan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan.

Frekuensi rapat dewan komisaris juga memiliki kontribusi dalam pengawasan pelaporan keuangan. Frekuensi rapat dewan komisaris dapat digunakan sebagai wadah untuk mendapatkan semua informasi mengenai perkembangan perusahaan yang bisa dijadikan bahan untuk pengawasan internal perusahaan lebih lanjut. Frekuensi rapat dewan komisaris dihitung berdasarkan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun, Roma (2012).

## 8. Frekuensi Rapat Komite Audit

Menurut BAPEPAM semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (*agent*) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, manajer kemungkinan tidak akan dapat memanipulasi laba, Prastiti (2013). Agar dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam pengawasan terhadap manajemen yang berusaha untuk mengoptimalkan kepentingannya sendiri adanya pertemuan komite audit ini sangat diperlukan.

Adanya independensi yang baik akan semakin lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya empat kali atau lebih dalam setahun, Putri (2011) dalam Prabowo (2014). Frekuensi Rapat Komite Audit merupakan jumlah rapat komite audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit, baik itu rapat dilakukan secara internal dalam departemen komite audit, rapat komite audit dengan direksi perusahaan serta rapat komite audit dengan dewan komisaris.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Hana Pricila Rahadi (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	Ukuran Dewan Direksi ( $X_1$ ), Ukuran Dewan Komisaris ( $X_2$ ), Kualitas Audit ( $X_3$ ),	Secara simultan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kualitas audit, dan transparansi komite

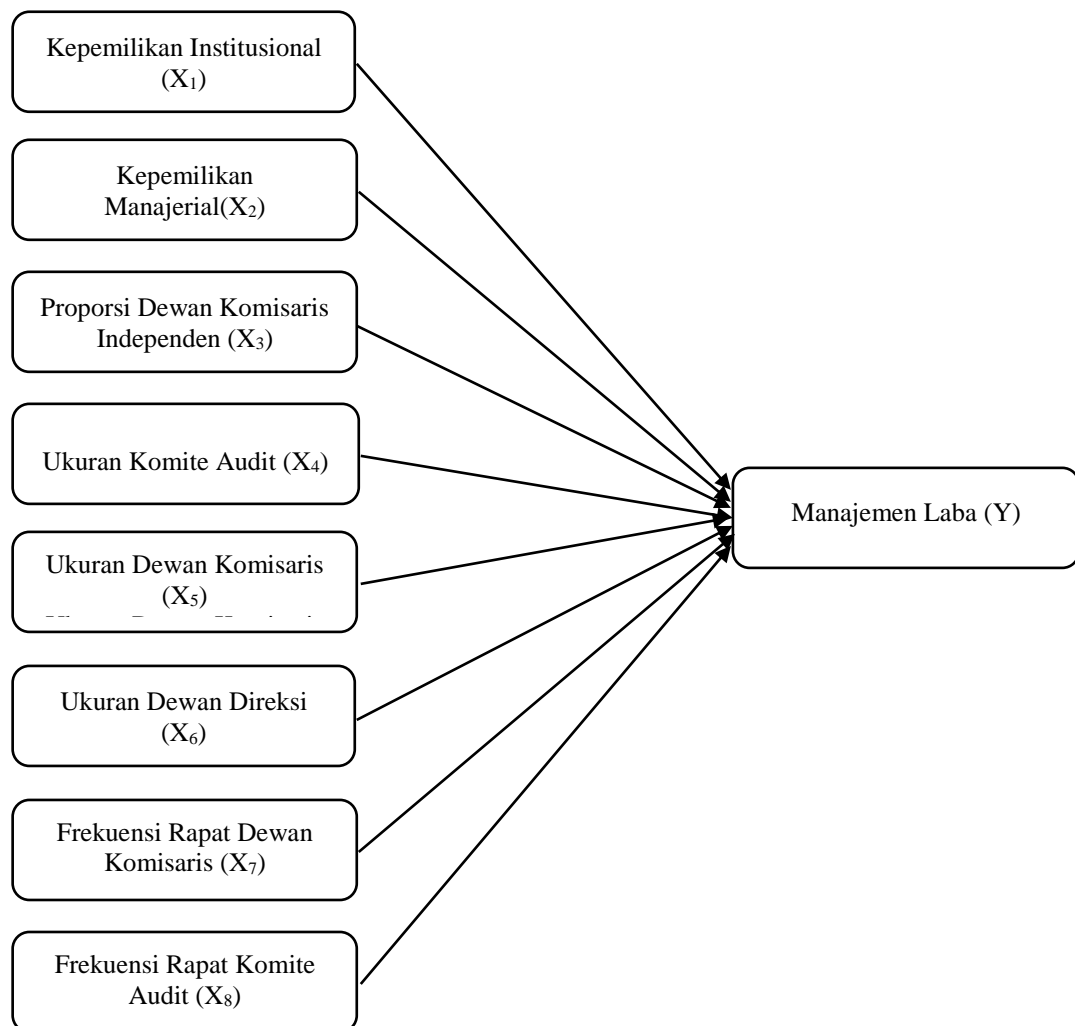
		Praktik Manajemen Laba Di Bursa Efek Indonesia	Transparansi Komite Audit ( $X_4$ ) dan Manajemen Laba ( $Y$ )	audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI
2.	Nieken Herma Sari dan Nurmala Ahmar (2014)	<i>Revenue Discretionary Model</i> Pengukuran Manajemen Laba Berdasarkan Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kebijakan Dividen ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), Komisaris Independen ( $X_3$ ) dan Manajemen Laba ( $Y$ )	Dengan menggunakan <i>revenue model</i> mampu mengindikasikan 8 sektor industri dari jumlah keseluruhan 13 sektor industri pada perusahaan manufaktur yang terindikasi manajemen laba aktual. Dengan menggunakan <i>conditional revenue model</i> mampu mengindikasikan 11 sektor industri dari jumlah keseluruhan 18 sektor industri yang terindikasi manajemen laba aktual.
3.	Ismalia Asward (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate</i>	Konsentrasi Kepemilikan ( $X_1$ ),	Menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan



		<i>Governance</i> terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan <i>Conditional Revenue Model</i>	Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), Kepemilikan Manajerial ( $X_3$ ), Komposisi Dewan Komisaris ( $X_4$ ) dan Manajemen Laba (Y)	komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
4.	Istianingsih dan Agus Sudiyar Tanjung (2016)	Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur	Komposisi Kepemilikan Institusional ( $X_1$ ), Komposisi Dewan Komisaris Independen ( $X_2$ ), Komposisi Komite Audit Independen ( $X_3$ ), Ukuran Perusahaan ( $X_4$ ), Leverage ( $X_5$ ), Ukuran KAP ( $X_6$ ) dan Manajemen Laba (Y)	Kepemilikan institusional, Komponen <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan size memiliki pengaruh positif dan leverage memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5.	Selvy Yulita Abdillah (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Pada	Keberadaan Komite Audit ( $X_1$ ), Proporsi Komisaris	Menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dan

		Manajemen Laba	Independen ( $X_2$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ), Kepemilikan Manajerial ( $X_4$ ) dan Manajemen Laba ( $Y$ )	kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba
6.	Melai Rahmawati (2017)	Pengaruh Kualitas Auditor dan Corporate Governance terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)	Kualitas Auditor ( $X_1$ ), Kepemilikan Manajerial ( $X_2$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ), Proporsi Dewan Komisaris Independen ( $X_4$ ), Ukuran Dewan Komisaris ( $X_5$ ), Komite Audit ( $X_6$ ) dan Manajemen Laba ( $Y$ )	Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

## 2.6 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional (X<sub>1</sub>), Kepemilikan Manajerial (X<sub>2</sub>), Proporsi Dewan Komisaris Independen (X<sub>3</sub>), Ukuran Komite Audit (X<sub>4</sub>), Ukuran Dewan Komisaris (X<sub>5</sub>), Ukuran Dewan Direksi (X<sub>6</sub>), Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (X<sub>7</sub>) dan Frekuensi Rapat Komite Audit (X<sub>8</sub>). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba (Y).

## **2.7 Bangunan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Cornet *et al.* (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang, Moh'd *et al.* (1998) dalam Suryani (2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Avin (2017) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dapat berperan sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* dalam mengurangi praktik manajemen laba. Investor institusional diasumsikan sebagai investor yang berpengalaman dan dapat melakukan analisa yang lebih baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen, oleh karena itu manajer akan menghindari tindakan manajemen laba sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas, Suranta (2005) dalam Abdillah (2016).

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba

### **2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung

risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Apabila semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan maka semakin besar melakukan tindakan manajemen laba karena adanya keinginan manajer untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya demi kepentingannya sendiri, Widiatmaja (2010) dalam Avin (2017) hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Penelitian Avin (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Jika semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajerial maka semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba. Keuntungan yang didapat oleh manajer yang memiliki saham di perusahaan akan berkurang sehingga opsi menurunkan laba menjadi pilihannya. Menurut Warfield *et al.* (1995) dalam Kusumawati (2013) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk *earnings management*.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba

### **2.7.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba**

Dewan komisaris independen adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang *reliable*. Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Tetapi besar kecilnya dewan komisaris independen bukan menjadi penentu efektifnya pengawasan terhadap manajemen

perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba karena seringkali proporsi dewan komisaris independen diduga hanya untuk pemenuhan ketentuan peraturan atau regulasi pemerintah. Penelitian Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ada sedikit atau banyaknya komisaris independen tidak mempengaruhi manajemen untuk tetap melakukan manajemen laba.

Komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan Boediono (2005). Adanya dewan komisaris menjamin transparansi dan keinformatifan laporan keuangan sehingga memfasilitasi hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Hasil penelitian Suryani (2010) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Abdillah (2016) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dengan proksi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *discretionary accrual* yang berarti berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub>: Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba

#### **2.7.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Peran komite audit sangat diperlukan dalam hal pengawasan perusahaan. Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Komite audit sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari komite audit, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informatif dan berkualitas. Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang

telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham. Dalton et al. (1999) dalam Prastiti (2013) menemukan bahwa komite audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Ukuran komite audit yang tepat akan memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani, et al (2014) dalam Avin (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam memonitor pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit tidak berhasil dalam mendeteksi manajemen laba. Hasil penelitian Nasution (2007) dalam Suryani (2010) menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara komite audit dengan manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit telah berhasil dalam mengurangi praktik manajemen laba perusahaan.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba

### **2.7.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba**

Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Pengawasan dilakukan agar kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang menemukan adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Namun karena dewan komisaris bertugas untuk memonitor atas pelaporan keuangan perusahaan, maka perannya diharapkan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas Boediono (2005) dalam Prastiti 2013).

Ukuran dewan komisaris mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan. Menurut Scott (2000) menyatakan ukuran dewan komisaris dapat

memberi efek yang berkebalikan (negatif) dengan efek terhadap kinerja. Penelitian Nasution dan Setyawan (2007) dalam Suryani (2010) menemukan pengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>5</sub>: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba

### **2.7.6 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba**

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Keberadaan dewan direksi tersebut bertugas sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan, maka ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan, Rahadi (2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2008) dalam Rahadi (2014) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi, maka akan semakin menekan terjadinya manajemen laba.

Penelitian Rahadi (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya ukuran dewan direksi tersebut menggambarkan bahwa semakin besar perusahaan dan banyak jumlah orang yang duduk dalam jajaran dewan direksi, semakin besarnya tingkat manajemen laba.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>6</sub>: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Manajemen Laba

### **2.7.7 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba**

Rapat dewan komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antara



anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Chen et al. (2006) dalam Prastiti (2013) menyatakan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, frekuensi rapat dewan komisaris adalah minimal dua kali dalam setahun. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun berjalan. Penelitian Prastiti (2013) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>7</sub>: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba

#### **2.7.8 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (*agent*) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Teori keagenan berpendapat bahwa dewan yang independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, manajer kemungkinan tidak akan dapat memanipulasi laba. Xie et al. (2003) dalam Prastiti (2013) menemukan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Lin et al. (2009) dalam Prabowo (2014) menyatakan semakin aktif komite audit melakukan rapat secara formal menunjukkan penurunan terhadap tingkat manajemen laba.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>8</sub>: Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba.



